KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PDIP Tak Ingin Rini Masuk Kabinet Baru
Tanggal : Senin, 29 Juli 2019
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 2

PDIP
Tak Ingin Rini Masuk Kabinet Baru

Jokowi mempertahankan Rini, meski desakan pencopotan telah muncul sejak awal periode pertama pemerintahannya.

Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan semua partai di Dewan Perwakilan Rakyat telah setuju agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dicopot dari jabatannya. Persetujuan ini tercatat dalam rekomendasi Panitia Khusus DPR tentang PT Pelindo II tahap kedua yang dibacakan dalam rapat paripurna, Kamis lalu.

Rekomendasi tahap kedua ini persis sama dengan rekomendasi Pansus yang sama pada 2015. Hendrawan mengatakan PDIP memahami bahwa jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Partainya pun menghargai sikap Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan Rini sebagai Menteri BUMN.

Meski begitu, Hendrawan menyatakan PDIP berbeda persepsi dengan Presiden dalam menilai Rini. Hendrawan tak merinci apa yang ia maksudkan dengan perbedaan persepsi itu. Ia hanya menjelaskan, faktanya Rini dipertahankan oleh Presiden meski DPR telah meminta Jokowi agar mencopot dia. "Kan dia dipertahankan di kabinet," kata Hendrawan kepada *Tempo*, kemarin.

Pansus Pelindo II merekomendasikan kepada presiden agar memecat Rini. Rekomendasi ini dibacakan Ketua Panitia Khusus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka, Kamis lalu. Politikus PDIP ini menyatakan Rini mengetahui adanya kerugian negara saat PT Pelindo II mengikat kontrak dengan swasta asing dalam mengelola pelabuhan.

Pansus juga menyatakan audit Badan Pemeriksa Keuangan Juni 2017 menyebutkan adanya kerugian negara minimal Rp 4 triliun dalam kontrak perpanjangan kerja sama PT Jakarta International Container Terminal (Pelindo II) dan Hutchison Port Holding (HPH). Selain itu, Pansus menemukan kerugian ne-

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

gara senilai US$ 14 juta dalam pembangunan beberapa pelabuhan menggunakan dana *global bond*.

Rieke menegaskan, sejak awal pembentukannya pada 2015; Pansus telah merekomendasikan kepada Presiden agar memecat Rini. "Pansus tetap pada sikap politik yang sama, merekomendasikan kepada Presiden untuk mengambil sikap kepada Menteri BUMN. Pansus mendukung Presiden untuk berani menggunakan hak prerogatifnya terhadap Menteri BUMN," kata Rieke.

Sejumlah politikus DPR menyebutkan PDIP telah lama menargetkan Rini agar dicopot. Pembentukan Pansus Pelindo II, kata sumber itu, juga merupakan inisiatif Fraksi PDIP yang kemudian disepakati oleh semua fraksi di DPR melalui lobi-lobi. Menjelang penyusunan kabinet baru Jokowi, PDIP melobi semua fraksi di Pansus agar ada rekomendasi mencopot Rini. Tujuannya, kata sumber itu, Rini tidak masuk kabinet baru Jokowi. "Pansus ini 'mainannya' PDIP untuk menekan presiden," kata seorang politikus asal koalisi partai pemerintah.

Sejumlah politikus DPR mengingatkan bahwa, sejak Rini membentuk tim transisi menjelang penyusunan kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi pada 2014, PDIP telah resistan terhadap Rini. Alasannya, Rini dianggap terlalu dominan dalam tim transisi. Selain itu, komunikasi politik Rini dengan elite PDIP dianggap buruk. "Sejak awal, PDIP tidak cocok dengan Rini. PDIP terus menyerang Rini agar ia tak masuk di kabinet baru nanti," kata seorang politikus.

Sumber *Tempo* di PDIP menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri marah dengan Rini yang dianggap membangun kekuasaan di dalam kabinet Jokowi. Rini dianggap mengabaikan aspirasi PDIP sebagai partai pengusung Jokowi. "Karena alasan itu, PDIP mendesak agar Jokowi melengserkan Rini," kata dia.

Hendrawan enggan mengomentari perihal hubungan PDIP dengan Rini. "Waduh, saya tidak tahu," kata Hendrawan. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, juga enggan berkomentar ihwal desakan pencopotan Rini. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan tanggapan," kata dia.

Rini belum menjawab pertanyaan perihal rekomendasi Pansus. Sebelumnya, dalam menanggapi desakan pencopotannya, Rini menyerahkannya kepada Presiden. "Harap tanya ke Bapak Presiden karena yang mempunyai hak prerogatif adalah presiden," kata Rini.

● BUDIARTI UTAMI PUTRI | SUNUDYANTORO

Catatan Rini

MENTERI Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno selalu disebut dalam setiap isu perombakan kabinet pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. DPR pun memboikot Rini dengan menolak untuk menggelar rapat dengan dia. Meski jabatannya terus digoyang, Rini bertahan di kabinet hingga hampir berakhirnya masa pemerintahan Jokowi periode pertama. Berikut ini catatan seputar Rini:

» Rini masuk bursa kocok ulang kabinet jilid pertama pada 12 Agustus 2015. Namanya juga mencuat sebagai menteri yang akan diganti dalam perombakan formasi kabinet kedua, 27 Juli 2016.

» Rini dianggap gagal karena sejumlah badan usaha milik negara tersandung masalah, seperti dalam kasus akrobat laporan keuangan maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan sejumlah perkara suap yang menerpa beberapa perusahaan pelat merah.

» Posisi Rini kian krusial karena saat ini ia sedang menyusun perubahan lembaga, dari kementerian menjadi *superholding*—layaknya Khazanah Nasional di Malaysia atau Temasek Holdings di Singapura. Bila rencana pembentukan *superholding* terwujud, posisi Kementerian BUMN akan hilang. Jabatan menteri pun lenyap, diganti dengan direktur utama yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ia disebut-sebut akan menduduki posisi ini.

NASKAH: AVIT HIDAYAT